

Eksplorasi Karakter Politik Demokrasi Buya Hamka Dalam Membentuk Civic Disposition Pada Mahasiswa

Ramsul Nababan ^{a,1*}, Ira Safitri ^{a,2}, Junaidi ^{b,3}, Surya Dharma ^{a,4}, Hodriani ^{a,4}

^a Universitas Negeri Medan, Indonesia

^b Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ ramsulnbbn@unimed.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Juni 2025;

Revised: 10 Juni 2025;

Accepted: 30 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Karakter;

Politik Demokrasi;

Civic disposition;

Buya Hamka.

ABSTRAK

Demokrasi Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari praktik politik transaksional, lemahnya budaya musyawarah, hingga rendahnya partisipasi kritis generasi muda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme demokrasi dengan realitas praktik kewarganegaraan, khususnya dalam pembentukan *civic disposition* mahasiswa sebagai agen perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakter politik demokrasi Buya Hamka dan relevansinya dalam membentuk *civic disposition* mahasiswa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Buya Hamka yang menekankan kepemimpinan berakhlak, musyawarah, dan ketakwaan berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter kewarganegaraan mahasiswa yang religius, bertanggung jawab, inklusif, dan menjunjung keadilan sosial. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi nilai-nilai etis dan spiritual ke dalam pendidikan kewarganegaraan kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang demokrasi berbasis nilai lokal-religius; secara praktis, menjadi dasar penguatan kurikulum PPKn dalam membina *civic disposition* generasi muda di era globalisasi.

ABSTRACT

Keywords:

Character;

Political Democracy;

Civic disposition;

Buya Hamka.

Exploring Buya Hamka's Democratic Political Character in Shaping Civic disposition Among University Students. Indonesian democracy continues to face a range of challenges, including transactional politics, a weakened culture of deliberation, and low levels of critical participation among younger generations. These issues reveal a significant gap between the ideals of democracy and the realities of civic practice, particularly in shaping the civic disposition of university students as agents of change. This study aims to explore Buya Hamka's political-democratic thought and its relevance in shaping students' civic disposition. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Buya Hamka's emphasis on ethical leadership (human as caliph), deliberation (musyawarah), and piety (taqwa) significantly contributes to forming civic character traits such as religiosity, responsibility, inclusiveness, and commitment to social justice among students. These findings underscore the importance of integrating ethical and spiritual values into contemporary civic education. Theoretically, this research enriches studies on democracy grounded in local-religious values; practically, it provides a foundation for strengthening the civic education curriculum (PPKn) in fostering civic disposition among the youth in an era of globalization.

Copyright © 2025 (Ramsul Nababan, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Nababan, R., Safitri, I., Junaidi, J., Dharma, S., & Hodriani, H. (2025). Eksplorasi Karakter Politik Demokrasi Buya Hamka Dalam Membentuk Civic Disposition Pada Mahasiswa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 909–919. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.12395>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Karakter ialah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, tabiat maupun watak (Hadi, 2019). Karakter yang diidamkan setiap negara untuk dimiliki oleh warga negaranya ialah karakter yang baik (Yuniar & Putri, 2022). Dalam berbagai aspek kehidupan, karakter sangat penting kehadirannya tidak terkecuali dalam melaksanakan demokrasi (Monteiro, 2015). Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi (Airlangga, 2019). Hal ini sejalan dengan pengertian demokrasi yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, dalam Prayitno & Prayugo (2023), bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat memiliki andil yang besar untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk dalam politik yang bebas dari tekanan pihak manapun sebab pada dasarnya rakyat yang memiliki kuasa untuk kepentingan bersama.

Pembentukan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan modern. *Civic disposition* merujuk pada kecenderungan nilai, sikap, dan komitmen individu dalam kehidupan bernegara, termasuk keterlibatan aktif, tanggung jawab sipil, serta penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi (Torney-Purta et al., 2001). Karakter kewarganegaraan menjadi fondasi penting bagi berfungsinya sistem demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, penguatan *civic disposition* harus menjadi agenda strategis pendidikan, khususnya pada jenjang perguruan tinggi, di mana mahasiswa diposisikan sebagai agen perubahan sosial (Banks, 2006).

Karakter dalam demokrasi sangat dibutuhkan karena demokrasi mengandung nilai-nilai yang sangat diperlukan untuk acuan dalam menata kehidupan berbangsa maupun bernegara yang baik (Wahab & Sapriya, 2023). Dengan demikian, demokrasi tidak akan berkembang secara optimal tanpa disertai dengan karakter demokratis yang kuat. Dalam pembentukan karakter warga negara yang demokrasi, terdapat banyak sekali karakter-karakter yang dapat dieksplorasi dari tokoh-tokoh politis nasional (Suwardani, 2020). Karakter-karakter tersebut nantinya selain dieksplorasi juga dapat diteladani dalam melaksanakan demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya (Na'imah & Bawani, 2021).

Sayangnya, di Indonesia, pembentukan *civic disposition* masih menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan kewarganegaraan kerap kali hanya menekankan aspek kognitif semata, tanpa menyentuh aspek afektif dan tindakan (Wahab & Sapriya, 2023). Padahal, *civic disposition* mencakup *civic virtue*, keutamaan kewarganegaraan seperti toleransi, tanggung jawab publik, dan partisipasi aktif, yang menjadi ciri khas model *civic republicanism* (Galston, 2001; Heater, 2003). Teori *civic republicanism* memandang warga negara bukan hanya sebagai individu yang memiliki hak, melainkan juga sebagai subjek moral dan politik yang wajib menjaga kepentingan publik melalui partisipasi dan pengambilan keputusan kolektif (Pettit, 1997).

Dalam kerangka ini, nilai-nilai demokrasi yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan spiritual masyarakat itu sendiri. Demokrasi bukan sekadar prosedur politik, tetapi merupakan praktik kebajikan sipil (*civic virtue*) yang harus dibentuk secara sadar melalui pendidikan dan keteladanan. Buya Hamka, sebagai tokoh intelektual dan politisi Muslim Indonesia, menawarkan perspektif yang menarik dan khas tentang demokrasi melalui konsep “demokrasi takwa.” Konsep ini melampaui pendekatan sekuler dengan

menekankan tiga pilar utama: manusia sebagai khalifah, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, dan masyarakat bertakwa sebagai cita ideal (Fata, 2020a).

Gagasan Buya Hamka tersebut relevan dikaji dalam kerangka citizenship education, karena menekankan aspek spiritual-moral dalam membentuk warga negara yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga bermoral secara individual dan kolektif. Gagasan ini juga sejalan dengan literatur internasional yang mulai menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu integrasi antara *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Hoskins & Crick, 2010). Menurut Westheimer & Kahne (2004), model kewarganegaraan yang ideal mencakup tiga dimensi: *personally responsible citizen*, *participatory citizen*, dan *justice-oriented citizen*, yang semuanya mengandaikan *civic disposition* yang kuat.

Salah satu yang saat ini berperan penting untuk melakukan penelusuran sekaligus meneladani karakter politik demokrasi Buya Hamka guna meningkatkan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) adalah mahasiswa (Arifin, 2024). Hal ini dikarenakan mahasiswa memiliki peran sebagai *agen of change* (agen perubahan) yang dapat menyalurkan suara masyarakat kepada pemerintah melalui pengawasan dalam sebuah pemerintahan agar keputusan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak sewenang-wenang, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Jannah & Sulianti, 2021).

Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai warga negara muda memiliki peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pelaku pasif dalam sistem demokrasi elektoral, tetapi juga pengawal nilai-nilai publik melalui tindakan moral dan sosial yang bertanggung jawab (Campbell, 2008). Sebagaimana dicatat oleh Lickona (2012), pendidikan karakter harus mampu mengembangkan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*.

Peran mahasiswa sebagai *agen of change* terlihat dari beberapa hal yakni: mahasiswa sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai luhur sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, mahasiswa sebagai penerus bangsa yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan bangsa dan kemaslahatan umum, mahasiswa sebagai kekuatan moral, dan mahasiswa sebagai pengawas sosial dalam masyarakat, pemerintahan, bangsa hingga pada akhirnya negara (Jannah & Sulianti, 2021).

Namun demikian, dalam praktik demokrasi di Indonesia, berbagai tantangan masih mengemuka. Sengketa politik pasca pemilu, praktik *money politics*, mobilisasi pemilih, hingga apatisme generasi muda menunjukkan lemahnya *civic disposition* dalam budaya politik kita (Muhamad, 2023; Purnawan, 2020). Tingginya jumlah pemilih pemula dari Generasi Z dalam Pemilu 2024 mencapai 56,45% menjadi indikator penting yang bisa menjadi tantangan maupun peluang dalam pembentukan budaya demokrasi substantif (Auwalijah et al., 2024).

Mahasiswa sebagai warga negara muda sekaligus agen perubahan tentunya memiliki peranan yang sangat penting untuk mengubah hal-hal yang tidak baik saat ini dalam demokrasi Indonesia menjadi hal-hal yang baik dengan memiliki karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (Hijran et al., 2022). Hal ini dapat dilakukan pada dirinya dengan cara

mengeksplorasi atau menelusuri karakter politik demokrasi Buya Hamka melalui konsep demokrasi, hingga pada akhirnya karakter yang sudah digali dan ditelusuri tersebut dapat diteladani dalam kehidupan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik pada masa kini dan pada masa yang akan datang.

Menariknya, terdapat keterkaitan antara prinsip-prinsip demokrasi yang diajukan oleh Buya Hamka dan nilai-nilai Islam seperti musyawarah (*al-syura*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab moral. Habibi (2019) menegaskan bahwa demokrasi dalam Islam tidak hanya prosedural, tetapi sarat dengan dimensi spiritual dan etis. L. Rahman & Rahman (2021) menambahkan bahwa musyawarah sebagai instrumen pengambilan keputusan merupakan jembatan antara prinsip keagamaan dan praktik demokrasi modern. Namun, masih jarang kajian yang secara eksplisit menelusuri karakter politik demokrasi Buya Hamka dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam membentuk *civic disposition* mahasiswa. Padahal, integrasi warisan pemikiran lokal, seperti pemikiran politik Buya Hamka, dengan kerangka teoritik global dapat menjadi jembatan penting dalam membangun model pendidikan kewarganegaraan kontekstual dan transformatif (Banks, 2006; Kerr, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakter politik demokrasi Buya Hamka dapat dieksplorasi dalam pembentukan *civic disposition* mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan transformatif.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam karakter politik demokrasi dalam konteks yang alami dan kontekstual (Abdussamad, 2021). Fokus penelitian diarahkan pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan dari angkatan 2020 hingga 2023 dengan jumlah total 20 orang partisipan, masing-masing 5 orang per angkatan. Pemilihan partisipan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria aktif dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki pengalaman dalam kegiatan musyawarah kampus, serta memahami isu-isu kewarganegaraan dan demokrasi. Teknik pengumpulan data melibatkan tiga langkah utama, yaitu observasi terhadap kegiatan lapangan, wawancara mendalam dengan partisipan, serta pengumpulan dokumen yang relevan. Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah dari catatan lapangan agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data tersebut. Tahap akhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana informasi yang diperoleh diuji konsistensinya untuk menjawab rumusan masalah (Rashid, 2022). Kesimpulan ini menjadi dasar dalam memahami kontribusi karakter politik demokrasi Buya Hamka terhadap pembentukan *civic disposition* mahasiswa. Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sebagai pendekatan utama validasi. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, dan perspektif analisis.

Hasil dan pembahasan

Buya Hamka adalah seorang tokoh politik dari Padang Tanah Minag yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Keikutsertaannya dalam perpolitikan beda dengan pahlawan lainnya yang berperang dengan menggunakan senjata akan tetapi, politik yang dilakukan Buya Hamka ialah dengan mengubah cara berpikir setiap orang melalui tulisan-tulisannya. Dengan tulisan ini terlihat bahwa Buya Hamka berani dalam memberikan ide, gagasan, dan juga pendapatnya mengenai Indonesia pada masanya (Fuadi, 2023). Namun, untuk membuat pemikiran Buya Hamka relevan bagi generasi saat ini, khususnya Generasi Z yang tumbuh di era digital dan global, perlu adanya pendekatan sintesis antara warisan pemikiran lokal dan kerangka teori pendidikan demokrasi kontemporer. Di sinilah pentingnya melihat pemikiran Hamka dalam cahaya teori *civic virtue* (Galston, 2001), *citizenship education* (Banks, 2006), dan *democratic education* (Gutmann, 1999), agar karakter demokrasi yang diusung Buya Hamka tidak hanya bersifat historis-normatif, tetapi aktual dan transformatif.

Dalam demokrasi sebagai bagian dari politik, Buya Hamka memiliki tiga konsep demokrasi yang melahirkan karakter-karakter politik demokrasi yang penting bagi pemuda termasuk mahasiswa untuk membentuk karakter kewarganegaraannya. Pertama, Manusia Sebagai Khalifah (Pemimpin) di muka bumi. Dalam pandangan Islam, manusia diberikan amanah mulia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Konsep ini tidak hanya menempatkan manusia sebagai pengatur urusan dunia, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai luhur kemanusiaan. Setiap individu pada hakikatnya memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, asalkan ia mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara adil, bijaksana, dan menjunjung tinggi nilai keadaban. Kepemimpinan bukanlah ajang untuk menunjukkan kekuasaan atau superioritas atas orang lain, melainkan ladang pengabdian yang sarat dengan tanggung jawab moral dan sosial (Fata, 2020a). Konsep ini senada dengan prinsip *justice-oriented citizenship* (Westheimer & Kahne, 2004), dimana kepemimpinan dilandasi oleh tanggung jawab sosial dan keadilan kolektif.

Pemikiran Buya Hamka mengenai manusia sebagai khalifah turut membentuk fondasi karakter politik demokrasi yang relevan dengan pembentukan *civic disposition* atau disposisi kewarganegaraan, khususnya bagi kalangan mahasiswa. Buya Hamka menekankan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia seperti sikap saling menghargai, kasih sayang, tanggung jawab, keberanian, profesionalitas, religiusitas, ketegasan, kebijaksanaan, dan kepekaan sosial. Karakter-karakter ini sangat penting dalam mewujudkan praktik demokrasi yang sehat dan beradab di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat di kalangan mahasiswa terhadap prinsip kepemimpinan moral.

Namun demikian, dalam praktik organisasi kampus ditemukan adanya kesenjangan antara pemahaman dan perilaku. Beberapa responden menyatakan bahwa jabatan dalam organisasi sering dijadikan alat untuk popularitas, bukan pelayanan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Banks (2015), yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang hanya menekankan aspek kognitif tidak cukup untuk membentuk *civic disposition*. Dibutuhkan pembelajaran reflektif dan pengalaman langsung agar nilai-nilai moral politik seperti kepemimpinan yang adil dapat benar-benar tertanam.

Penelitian Iswiyanto (2025), mendukung pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan *ukhuwah*, ke dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga membentuk peserta didik yang bermoral dan berakhlak mulia. Pemikiran Buya Hamka yang

menjadikan akhlak sebagai fondasi utama kepemimpinan dalam demokrasi, seperti sikap saling menghargai, tanggung jawab, dan kepekaan sosial, memperkuat hasil temuan tersebut. Lebih lanjut, hasil penelitian Azzahra & Prasetyo (2022), juga menunjukkan bahwa integrasi budaya sekolah Islam ke dalam pembelajaran PPKn mampu memperkuat karakter religius peserta didik melalui pengaitan materi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Konsep religiusitas dan kepekaan sosial yang dikemukakan Buya Hamka sebagai karakter utama dalam kepemimpinan demokratis selaras dengan temuan empiris ini, yang menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis nilai spiritual dan akhlak mampu menghasilkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan sosial.

Kedua, konsep musyawarah sebagai landasan hidup bermasyarakat. Salah satu cara untuk menjaga harmoni dalam keberagaman adalah melalui musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan bersama secara deliberatif dan inklusif. Musyawarah menjadi pilar penting dalam demokrasi Pancasila karena mampu menyatukan berbagai aspirasi menjadi satu keputusan yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Lebih dari sekadar forum diskusi, musyawarah memiliki nilai moral dan etik yang tinggi, yakni mendorong terciptanya keadilan sosial serta mencegah dominasi satu pihak atas yang lain (Fata, 2020b). Hal ini menempatkan musyawarah setara dengan *deliberative democracy* sebagaimana dikembangkan oleh Gutmann & Thompson (2004), yang menekankan pada kewajiban warga negara untuk berdialog dengan menghormati alasan publik.

Dalam perspektif karakter politik demokrasi Buya Hamka, musyawarah dipandang sebagai pondasi penting dalam membentuk *civic disposition* atau disposisi kewarganegaraan, khususnya di kalangan mahasiswa. Buya Hamka menekankan bahwa nilai-nilai musyawarah harus ditanamkan melalui sikap partisipatif, kemampuan bekerjasama, pembelajaran aktif, keterampilan menyelesaikan konflik, dan rasa tanggung jawab sosial. Mahasiswa sebagai agen perubahan dituntut untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus melalui proses dialog yang inklusif dan penuh empati.

Praktik musyawarah dalam kehidupan kampus dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam organisasi, pengambilan keputusan secara kolektif, dan menjunjung tinggi sikap adil serta tidak memaksakan kehendak. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan, serta konsisten menjalankan amanah dan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aktivitas sosial. Dengan membiasakan diri bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa tidak hanya membentuk kepribadian yang demokratis, tetapi juga memperkuat budaya politik yang berkeadaban dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Namun, berdasarkan keterangan salah satu informan menuturkan:

"Di organisasi, semua keputusan diambil secara bersama-sama. Namun terkadang, Cuma formalitas. Yang ngomong banyak yang mendengarkan sedikit." (Wawancara dengan Informan MYP, 12 Februari 2025).

Berdasarkan keterangan ini menggambarkan bahwa keterputusan antara idealisme musyawarah dan realitas implementatifnya di kalangan mahasiswa. Sebagian besar partisipasi masih bersifat prosedural, bukan deliberatif. Padahal, *civic disposition* yang kuat ditandai oleh kemauan untuk mendengarkan, menghargai perbedaan, dan mencapai mufakat dalam kerangka keadilan sosial (Hoskins & Crick, 2008). Penelitian Murwaningsih (2020) mendukung hal ini: internalisasi nilai musyawarah harus difasilitasi melalui ruang dialog yang otentik, bukan formalitas struktural. Pendidikan demokrasi harus bertransformasi dari *teaching about democracy* menjadi *teaching for democracy*.

Sementara itu, Murwaningsih (2020), menunjukkan bahwa strategi internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui pemberian amanah, forum diskusi kelompok (FGD), dan pembiasaan diskusi di lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (BEM FKIP UNS) secara efektif membentuk budaya musyawarah sebagai bagian dari *civic disposition* mahasiswa. Kegiatan tersebut melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan mengedepankan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian Rahman & Supriyadi (2015) mendukung relevansi konsep ini, dalam studi mereka terhadap Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HMPS PPKn) Universitas Ahmad Dahlan menemukan bahwa fungsi musyawarah terbukti membentuk sikap demokratis mahasiswa melalui penguatan nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan keadilan. Namun, mereka juga mencatat tantangan berupa lemahnya itikad baik dan rendahnya motivasi kolektif dalam praktik musyawarah kampus. Hal ini menegaskan perlunya penguatan etos musyawarah secara terus-menerus.

Ketiga, Konsep takwa sebagai landasan moral masyarakat merupakan puncak dari pemikiran Buya Hamka dalam membangun fondasi kepemimpinan dan kehidupan berbangsa yang bermartabat. Takwa dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai hubungan spiritual antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga sebagai sumber nilai moral yang mengarahkan perilaku sosial individu dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam hal ini, Buya Hamka menegaskan bahwa demokrasi harus berpijak pada moralitas yang transenden agar tidak terjerumus dalam sekularisme kekuasaan (Fata, 2020b). Salah satu informan menjelaskan:

"Jika tidak memiliki rasa ketakutan atas Tuhan, maka demokrasi jadi bebas seenak saja. Takwa itu yang bikin kita malu kalau korupsi atau zolim." (Wawancara dengan Informan SB, 12 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan diatas menegaskan bahwa mahasiswa memahami takwa sebagai pengontrol etika dalam kehidupan politik. Namun tantangan muncul ketika nilai-nilai religius tidak diterjemahkan ke dalam tindakan politik kolektif. Di sinilah letak relevansi gagasan Westheimer & Kahne (2004), tentang *personally responsible citizenship*, yang harus ditingkatkan menjadi *justice-oriented citizenship*, yakni keberanian untuk mengubah struktur ketidakadilan, bukan sekadar menjadi pribadi baik.

Selanjutnya, Ilmiah et al. (2023), menunjukkan bahwa praktik ketakwaan dalam kehidupan kampus, seperti menjaga integritas, tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi, dan menjunjung etika publik merupakan indikator penting *civic disposition* yang berbasis moral dan spiritual. Ketika nilai takwa ini disertai aksi nyata, maka demokrasi bukan hanya prosedur, tetapi jalan pengabdian.

Dalam kerangka karakter politik demokrasi Buya Hamka, ketakwaan menjadi basis penting dalam membentuk *civic disposition* mahasiswa yang religius dan bermoral. Karakter kewarganegaraan yang ditekankan dalam konsep ini mencakup sikap religius, tanggung jawab, jujur, amanah, serta kesadaran penuh dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Karakter-karakter tersebut bukan hanya penting dalam membentuk pemimpin yang berintegritas, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam membangun praktik demokrasi yang beretika dan humanis di Indonesia.

Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa perlu menanamkan nilai takwa dalam setiap aktivitas, baik dalam konteks akademik, organisasi, maupun kehidupan sosial. Kesadaran ini dapat dibangun melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas kampus seperti organisasi

kemahasiswaan, kerja kelompok, diskusi kelas, dan kegiatan sosial yang menuntut tanggung jawab kolektif. Dengan menjadikan ketakwaan sebagai fondasi moral, mahasiswa tidak hanya akan tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu membawa demokrasi ke arah yang lebih beradab, adil, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran ketuhanan.

Sejumlah temuan empiris mendukung pandangan Buya Hamka ini. Ubaidillah et al., (2023), menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara terintegrasi mampu meningkatkan karakter disiplin dan kesadaran tanggung jawab mahasiswa, dengan ketakwaan sebagai fondasi utama perubahan perilaku positif. Temuan ini menegaskan bahwa takwa bukan hanya bersifat spiritual, melainkan juga memiliki dimensi praktis dalam membentuk *civic disposition* yang kuat. Selain itu, Siregar & Pratiwi (2022), melalui studi tentang revitalisasi *civic disposition* dalam pembelajaran kewarganegaraan, menunjukkan bahwa integrasi materi hak, kewajiban, dan prinsip-prinsip demokrasi mampu membentuk kesadaran moral serta tanggung jawab kolektif mahasiswa. Inti dari proses ini adalah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ketakwaan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga bersifat sosial-politik dalam kerangka kehidupan demokrasi. Keseluruhan temuan ini mendukung kuat pemikiran Buya Hamka bahwa ketakwaan merupakan landasan utama dalam membentuk karakter mahasiswa yang beradab, bertanggung jawab, dan mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa yang demokratis.

Karakter-karakter politik demokrasi Buya Hamka penting untuk dimiliki oleh mahasiswa sebagai warga negara muda yang nantinya akan menjadi regenerasi kepemimpinan di Indonesia untuk membawa demokrasi Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia untuk lebih baik terimplemtasi dalam kehidupan nyata melalui pemuda-pemudanya termasuk mahasiswa dengan menggunakan konsep demokrasi Buya Hamka ini dalam mendorong terealisasinya demokrasi Pancasila yang lebih baik untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, mahasiswa dijadikan sebagai targetan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui karakter-karakter di atas adalah karena mahasiswa sebagai kalangan intelektual diharapkan dapat lebih memahami dengan baik karakter demokrasi Buya Hamka ini agar pelaksanaannya juga dapat baik dilakukan dan menghindari pemahaman yang sempit dan pelaksanaan yang tidak baik.

Studi yang dilakukan oleh Jamaludin et al. (2023), menguatkan gagasan bahwa *civic disposition*, yakni pembentukan sikap, nilai, dan perilaku warga negara yang demokratis harus dimulai dari ketakwaan dan pemahaman moral (*moral knowing*), sebagaimana ditegaskan oleh Buya Hamka. Integrasi antara nilai-nilai religius dengan praktik-praktik demokratis seperti musyawarah, kerjasama, toleransi, dan empati bukan hanya relevan, melainkan menjadi hal yang esensial dalam pembentukan karakter mahasiswa. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan politik seharusnya bersifat *transformative*, bukan sekadar transfer pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga proses pembentukan kesadaran moral-politik yang membumi dalam aktivitas mahasiswa sehari-hari. Dalam hal ini, konsep Buya Hamka memberikan arah yang jelas bahwa demokrasi yang sejati hanya bisa terwujud melalui pemimpin-pemimpin muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial.

Meskipun pemikiran Buya Hamka lahir dari konteks historis kolonial dan pasca-kemerdekaan, substansi nilainya tetap relevan dalam menjawab tantangan demokrasi saat ini. Namun, terdapat gap antara idealisme Buya Hamka dan realitas generasi muda saat ini. Generasi Z hidup dalam era instan, algoritma media sosial, dan krisis kepercayaan terhadap

institusi politik. Dalam studi Monteiro (2015), ditemukan bahwa mahasiswa cenderung memiliki pemahaman normatif terhadap demokrasi, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukan civic action. Ketakwaan sebagai nilai personal tidak cukup tanpa keberanian melakukan advokasi dan kontrol terhadap kebijakan publik. Dalam hal ini, pendekatan transformatif dari pendidikan kewarganegaraan menjadi keharusan: mahasiswa tidak hanya diajarkan apa itu demokrasi, tetapi bagaimana memperjuangkannya secara etis.

Melalui sintesis antara pemikiran politik Buya Hamka dan teori pendidikan kewarganegaraan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa karakter politik demokrasi Buya Hamka: *khalifah*, musyawarah, dan takwa merupakan tiga poros pembentuk *civic disposition* mahasiswa. Namun, agar nilai-nilai tersebut relevan, harus diterjemahkan ke dalam konteks sosial-politik kontemporer melalui pembelajaran transformatif, praktik deliberatif, dan kepemimpinan moral.

Simpulan

Pemikiran Buya Hamka memiliki relevansi kuat dalam pembentukan *civic disposition* atau disposisi kewarganegaraan mahasiswa di era kontemporer. Buya Hamka menekankan tiga pilar utama, kepemimpinan yang berlandaskan akhlak (manusia sebagai *khalifah*), musyawarah sebagai prinsip hidup bermasyarakat, dan ketakwaan sebagai landasan moral, yang secara integral membentuk karakter kewarganegaraan yang beradab, religius, bertanggung jawab, jujur, serta menjunjung tinggi keadilan dan persatuan. Mahasiswa sebagai generasi muda dan calon pemimpin bangsa perlu dipersiapkan tidak hanya dari aspek intelektual, tetapi juga melalui pembentukan karakter politik yang kuat dan bermoral. Nilai-nilai demokrasi Buya Hamka dapat diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas akademik dan sosial, yang tidak hanya memperkuat pemahaman kognitif tentang demokrasi, tetapi juga membentuk kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan ajaran ketuhanan. Dengan demikian, pemikiran politik demokrasi Buya Hamka memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan demokrasi yang beretika dan humanis di Indonesia, sekaligus menjadi landasan yang kokoh dalam membina mahasiswa agar menjadi warga negara yang sadar hak, tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis secara bijaksana dan beradab. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan pada pendekatan deskriptif-kualitatif yang digunakan masih terbatas pada ruang lingkup lokal, sehingga generalisasi terhadap konteks nasional maupun internasional masih memerlukan kajian lanjutan. Kedua, belum semua dimensi *civic disposition* tergali secara komprehensif, terutama terkait keterlibatan digital dan aktivisme mahasiswa di era *post-truth*. Dengan demikian, diperlukan perbandingan antara pemikiran Hamka dan tokoh internasional dalam ranah pendidikan demokrasi, seperti Amy Gutmann, Parker J. Palmer, atau John Dewey. Upaya mengintegrasikan nilai-nilai Buya Hamka secara efektif ke dalam kurikulum PPKn langkah yang dapat diadopsi mengintegrasikan proyek sosial berbasis nilai seperti musyawarah di komunitas lokal atau kampus dengan refleksi berbasis konsep kepemimpinan moral. Selain itu merancang modul khusus dengan tema demokrasi takwa Buya Hamka sebagai bagian dari materi tentang tokoh nasional dan demokrasi yang mengaitkan akhlak, musyawarah, dan ketakwaan dengan *civic virtue*.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1–10.

- Arifin, M. F. (2024). Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Buya Hamka Dalam Menjawab Isu-Isu Aktual Pendidikan Kontemporer. *Turats*, 17(2), 161–173.
- Auwaliyah, N. H., Ridwan, R., Listiani, E. I., Ningsih, T. R., Aldo, F. D., Ayudia, L., Putri, K. A. P., Jessica, K., Noor, M. H. A., & Ilham, N. F. Y. (2024). Peran Bawaslu dan Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak Dalam Membangun Partisipatif Pemilu Pemula pada Pilkada 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 4(2), 235–246.
- Azzahra, T., & Prasetyo, W. H. (2022). Integrasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Budaya Sekolah Islam bagi Karakter Peserta Didik. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2), 120–129.
- Banks, J. A. (2006). *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. John Wiley & Sons.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Routledge.
- Campbell, D. E. (2008). Voice in the classroom: How an open classroom climate fosters political engagement among adolescents. *Political Behavior*, 30, 437–454.
- Fata, A. K. (2020a). *Buya Hamka: pemikiran & perannya di pentas politik nasional*. RaSAIL Media Group.
- Fata, A. K. (2020b). *Pemikiran Dan Peran Politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)*.
- Fuadi, A. (2023). *Buya Hamka: Novel Biografi*. PT Falcon.
- Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science*, 4(1), 217–234.
- Gutmann, A. (1999). *Democratic education: Revised edition*.
- Gutmann, A., & Thompson, D. F. (2004). *Why deliberative democracy?* Princeton University Press.
- Habibi, O. (2019). Sistem demokrasi dan kekhilafan dalam syariat Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(1), 44–81.
- Hadi, I. A. (2019). Pentingnya pendidikan karakter dalam lembaga formal. *Jurnal Inspirasi*, 3(1).
- Heater, D. (2003). *A history of education for citizenship*. Routledge.
- Hijran, M., Oktariani, D., & Rahmani, Z. (2022). Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda dalam menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6763–6774.
- Hoskins, B., & Crick, R. D. (2008). Learning to Learn and Civic Competences: different currencies or two sides of the same coin. *Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities*.
- Hoskins, B., & Crick, R. D. (2010). Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education*, 45(1), 121–137.
- Ilmiah, W., Rasyidi, R., Sujannah, N., Murda'ah, B., & Ngulwiyah, I. (2023). Pendidikan Karakter Religius Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Melalui Program Bina Masjid Kampus Bangkit. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 9(1).
- Iswiyanto, H. A. (2025). Integrasi Manajemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 15–29.
- Jamaludin, J., Junaidi, J., Nurainun, N., Pratama, M. Y., & Harahap, N. F. (2023). Da'wah and Transformative Leadership: Tuan Imam's Role in Nurturing Islamic Values in Kampung Kasih Sayang. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 6(2), 249–261.
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif mahasiswa sebagai agen of change melalui pendidikan kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(2), 181–193.
- Kerr, D. (2005). *Citizenship Education: An International Comparison*.
- Lickona, T. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab* (U. Wahyudin & Suryani (eds.); J. A. Wamaungo (trans.)). Bumi Aksara.

- Monteiro, J. M. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan membentuk karakter bangsa*. Deepublish.
- Muhamad, N. (2023). *KPU: Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/faf64350269doc8/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>
- Murwaningsih, I. (2020). *Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Untuk Membangun Budaya Musyawarah Pengurus dan Anggota Bem Sebagai Wujud Civic disposition (Studi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta)*.
- Na'imah, I., & Bawani, I. (2021). Penanaman Pendidikan Karakter Demokratis Di Pondok Pesantren. *Jurnal Muara Pendidikan*, 6(2), 228–236.
- Pettit, P. (1997). *Republicanism: A theory of freedom and government*. Oxford University Press.
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Deepublish.
- Purnawan. (2020). *Pasca penetapan paslon, Bawaslu register 59 permohonan sengketa pilkada 2020*. Bawaslu.Go.Id. <https://bawaslu.go.id/id/berita/pasca-penetapan-paslon-bawaslu-register-59-permohonan-sengketa-pilkada-2020>
- Rahman, A., & Supriyadi, S. (2015). Pembentukan Sikap Demokratis melalui Fungsi Musyawarah pada Pengurus dan Anggota HMPS PPKn Universitas Ahmad Dahlan Periode 2013-2014. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 123–138.
- Rahman, L., & Rahman, F. (2021). Al-Syūra dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1).
- Rashid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teroi, Metode, dan Praktek*. IAIN Kediri Press.
- Siregar, H., & Pratiwi, S. N. (2022). Revitalisasi *Civic disposition* Melalui Mata Kuliah Kewarganegaraan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 17–23.
- Suwardani, N. P. (2020). *“Quo Vadis” Pendidikan Karakter: dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat*. Unhi Press.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and Education in Twenty-eight Countries Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 3.
- Ubaidillah, M. B., Abas, E., Supriyanto, A., Jalil, M. A., Dahlan, M. Z., & Solong, N. P. (2023). Penanaman Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Mahasiswa melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Mayjen Sungkono. *Language*, 12996, 13002.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2023). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269.
- Yuniar, A. E., & Putri, N. K. (2022). Membentuk Karakter Bangsa Yang Kuat dengan Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 113–125.